

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK (STUDI PADA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA KABUPATEN SIDOARJO)

Balqis Ghassani Iriyanto Putri

Afiliasi; UIN Sunan Ampel Surabaya

balqisghassaniip@gmail.com

Holilah

Afiliasi; UIN Sunan Ampel Surabaya

holilah@uinsby.ac.id

Abstrak

Studi mengenai pemberdayaan perempuan dalam partai politik selama ini hanya berfokus pada beberapa aspek seperti kebijakan dan kompetensi, belum ada studi yang secara khusus membahas secara menyeluruh bagaimana perempuan diberdayakan di dalam partai politik. Studi ini hendak memberikan gambaran secara menyeluruh upaya pemberdayaan, faktor penghambat dan strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pemberdayaan perempuan dalam partai politik khususnya DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo. Studi ini juga akan mengungkapkan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh partai secara umum cenderung masih nomatif atau separuh hati dalam memajukan peran perempuan di politik. Teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan Edi Suharto dan teori perempuan dan partai politik Ani W. Soetjipto. Hasil studi menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo adalah mengimplementasikan kebijakan afirmasi, membentuk bidang dan organisasi sayap perempuan, menjalankan kaderisasi, memberikan pendidikan politik, menempatkan perempuan pada posisi strategis dan melibatkan perempuan dalam setiap program dan kegiatan partai. Pemberdayaan dijalankan kepada dua elemen yaitu perempuan kader dan perempuan masyarakat. Faktor penghambat pemberdayaan adalah peran domestik, budaya patriarki, agama dan kurangnya komitmen partai. Strategi mengatasi hambatan pemberdayaan adalah memberikan keleluasaan waktu, mendorong perempuan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan serta memberikan pelatihan negosiasi kepada perempuan.

kata kunci: *Pemberdayaan; Perempuan; Partai Gerindra*

Abstract

Studies on women's empowerment in political parties have so far only focused on several aspects such as policies and competencies, there has been no study

that specifically discusses how women are empowered in political parties. This study aims to provide a comprehensive overview of empowerment efforts, inhibiting factors and strategies taken to overcome obstacles to women's empowerment in political parties, especially the DPC of Gerindra Party in Sidoarjo Regency. This study will also reveal that empowerment efforts made by parties in general tend to be normative or half-hearted in advancing the role of women in politics. The theories used are Edi Suharto's empowerment theory and Ani W. Soetjipto's theory of women and political parties. The study results show that empowerment efforts in the DPC of the Gerindra Party in Sidoarjo Regency are implementing affirmation policies, forming women's fields and wing organizations, carrying out regeneration, providing political education, placing women in strategic positions and involving women in every party program and activity. Empowerment is carried out to two elements, namely women cadres and community women. Factors inhibiting empowerment are domestic roles, patriarchal culture, religion and lack of party commitment. Strategies to overcome obstacles to empowerment are to provide time flexibility, encourage women to be active in community and religious activities and provide negotiation training to women.

keywords: *Empowerment; Women; Gerindra Party*

Article History: Received 27 May 2024, Revised 11 July 2024, Accepted 11 July 2024, Available online 30 April 2024

Pendahuluan

Kondisi perpolitikan di Indonesia sampai saat ini menunjukkan bahwa posisi dan peran perempuan dalam bidang politik masih termarginalkan. Hal tersebut dibuktikan dari data representasi perempuan di lembaga legislatif (DPR RI) dimana dari pemilu tahun 1950 hingga 2019, jumlah keterwakilan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.¹ Selain itu, perempuan juga masih minim menempati jabatan-jabatan publik yang strategi baik tingkat lokal maupun nasional. Meskipun telah hadir kebijakan afirmasi atau kuota minimal keterwakilan politik perempuan, pada praktiknya partisipasi perempuan dalam politik masih rendah bahkan belum pernah mencapai target minimal keterwakilan sebesar 30 persen. Untuk itu, pada gilirannya pemberdayaan perempuan di bidang politik terutama

¹ Juniar Laraswanda Umagapi, "REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN HASIL PEMILU 2019: TANTANGAN DAN PELUANG," *Kajian* 25, no. 1 (2020): 19–34.

dalam partai politik merupakan salah satu upaya konkrit lainnya guna mendukung keterlibatan perempuan dalam politik. Pemberdayaan perempuan melalui partai politik merupakan langkah awal untuk meningkatkan partisipasi, kapasitas dan keterwakilan perempuan dalam politik.²

Partai politik menjadi salah satu aktor utama dalam memberdayakan perempuan di bidang politik karena hanya partai satu-satunya institusi politik yang mampu merekrut dan memilih calon untuk pemilihan serta menentukan agenda kebijakan suatu negara. Bagaimana partai politik memupuk dan mendorong keterlibatan perempuan dalam politik menjadi prospek utama pemberdayaan politik perempuan.³ Pemberdayaan perempuan melalui partai politik diharapkan dapat membuka akses bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan anggaran sehingga perempuan dapat turut merasakan manfaat dari keputusan tersebut serta pada gilirannya mampu memberdayakan kelompok perempuan lainnya.⁴ Selain itu perempuan diharapkan dapat turut serta mengisi pembangunan lewat jalur politik.⁵

Namun realitas yang ada selama ini menunjukkan bahwa partai politik pada umumnya belum memiliki langkah berarti dan komitmen penuh terhadap pemberdayaan perempuan dalam bidang politik.⁶ Fenomena dimana partai politik selalu merasa kekurangan kader perempuan untuk direkrut menjadi calon anggota legislatif karena alasan rendahnya minat dan kualitas perempuan, “perilaku asal comot” yang sangat sering mewarnai pencalonan anggota legislatif terutama anggota legislatif perempuan serta masih minimnya

² Nurman, “Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera Kota Padang Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan,” *Journal of Moral and Civic Education* 1, no. 2 (2017): 63–73, <https://doi.org/doi.org/10.24036/8851412020171219>.

³ Julie Ballington, *Pemberdayaan Perempuan Demi Partai Politik Yang Lebih Kuat* (United Nations Development Programme dan National Democratic Institute, 2011).

⁴ Bambang Teguh Budiono, Tokoh masyarakat dari Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, 2022.

⁵ Bambang Lukman, Tokoh masyarakat dari Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo, 2022.

⁶ Siti Nurul Hidayah, “Keterwakilan Perempuan Dalam Politik,” *detikNews*, 2018, <https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>.

perempuan duduk di lembaga-lembaga politik yang strategis menjadi suatu indikasi belum serius dan optimalnya partai dalam memberdayakan perempuan di bidang politik.⁷

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) khususnya di Kabupaten Sidoarjo yang mana terkait dengan partisipasi politik perempuan dapat dikatakan masih cukup rendah yaitu berdasarkan hasil pemilu 2019 hanya terdapat 8 orang perempuan (16 persen) yang berhasil duduk di lembaga legislatif, Partai Gerindra menjadi salah satu partai politik yang memperlihatkan perhatiannya terhadap pemberdayaan perempuan dalam bidang politik. Berdasarkan data representasi perempuan pada pemilu legislatif di Kabupaten Sidoarjo, Partai Gerindra menjadi salah satu partai yang secara konsisten mampu mendudukkan kader perempuan selama tiga penyelenggaraan pemilu yakni 2009, 2014 dan 2019.⁸ Keberhasilan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Partai Gerindra di Kabupaten Sidoarjo memiliki perhatian dan komitmen yang serius terhadap pemberdayaan perempuan dalam bidang politik.

Untuk itu, studi ini fokus membahas tiga hal utama, pertama, upaya pemberdayaan perempuan di bidang politik, kedua, faktor-faktor yang menghambat upaya pemberdayaaan perempuan, ketiga, strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemberdayaan perempuan pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo.

Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu

Studi mengenai pemberdayaan perempuan di bidang politik terutama dalam partai politik sejauh ini membahas pada beberapa aspek atau ruang lingkup seperti kebijakan, kompetensi dan dalam lingkup organisasi sayap partai. Studi mengenai kebijakan partai

⁷ Nurman, "Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera Kota Padang Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan."

⁸ "Calon Terpilih Sidoarjo Hasil Pileg 2009-2019" (KPU, 2020), <https://kab-sidoarjo.kpu.go.id/page/read/calon-terpilih>.

dalam pemberdayaan politik perempuan yang dilakukan oleh Nurman mengungkapkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera Kota Padang dalam rangka memberdayakan politik perempuan adalah dengan mengimplementasikan kebijakan internal partai yakni kebijakan rekrutmen dan kaderisasi yang netral gender (tidak membedakan pemberdayaan perempuan dan laki-laki). Pada kebijakan rekrutmen, PKS Kota Padang menerapkan model rekrutmen yang bersifat terbuka untuk anggota partai ataupun caleg tanpa membedakan antara perempuan atau laki-laki (netral gender). Sementara pada kebijakan kaderisasi, setiap anggota harus melalui proses pengkaderan yang berjenjang dengan terlibat aktif dalam program pelatihan atau training yang disebut Tarbiyah Tsagiffiyah (TTS) yang terdiri dari jenjang dasar (TD), jenjang menengah (TMKS), dan jenjang atas baik bagi anggota atau kader perempuan dan laki-laki. Disamping itu, kebijakan rekrutmen dan kaderisasi pada bidang perempuan PKS didasari dengan adanya program atau kegiatan pengajian dan rumah keluarga Indonesia (RKI) untuk peningkatan kapasitas kader perempuan dan kajian-kajian seputar rumah tangga dan kewanitaan.⁹

Studi lainnya yaitu mengenai pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kompetensi perempuan menuju parlemen yang dilakukan oleh Citra Restu Lestari menjelaskan bahwa bentuk dan strategi pemberdayaan dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara adalah dengan memberikan pelatihan public speaking, leadership, management, mapping, gerakan silaturahmi tokoh perempuan, gerakan silaturahmi lembaga, menjalankan program Rumah Keluarga Indonesia (RKI), workshop pendampingan keluarga di era digital dan kajian rutin BPKK (Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga). Pemberdayaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan skill politik yang dibutuhkan untuk membranding diri perempuan di ranah publik. Studi ini juga menjelaskan bahwa persoalan budaya patriarki dan dukungan keluarga terhadap

⁹ Nurman, "Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera Kota Padang Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan."

partisipasi perempuan di politik menjadi faktor yang menyebabkan perempuan belum mampu duduk di kursi parlemen.¹⁰

Studi mengenai pemberdayaan dalam lingkup organisasi sayap perempuan partai yang dilakukan oleh Nur Komariyah mengemukakan bahwa Perempuan Bangsa sebagai organisasi sayap perempuan PKB Kabupaten Sidoarjo menjalankan pemberdayaan perempuan dengan model pendekatan pelatihan (model pemberdayaan dalam bentuk pelatihan atau praktik) yakni mengadakan program-program keterampilan, workshop tentang perempuan dan anak, pelatihan entrepreneur dan sekolah gender agar perempuan memiliki kemampuan berpolitik. Kelompok yang menjadi asaran pemberdayaan yang dijalankan oleh Perempuan Bangsa adalah jamiyah-jamiyah seperti Muslimat dan Fatayat.¹¹

Berdasarkan hasil studi diatas, pembahasan mengenai pemberdayaan perempuan dalam partai politik terdapat pada beberapa aspek atau ruang lingkup, belum ada studi yang membahas atau memotret upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh partai politik secara utuh dan menyeluruh. Untuk itu, studi ini hendak melengkapi studi-studi sebelumnya. Studi ini juga akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menghambat upaya pemberdayaan yang dijalankan oleh partai serta strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemberdayaan perempuan.

Pemberdayaan

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok lemah dan rentan sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan salah satunya untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi

¹⁰ Citra Restu Lestari, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kompetensi Perempuan Menuju Parlemen (Studi Kasus Di DPD Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara)" (Universitas Sumatera Utara, 2018), <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/7562>.

¹¹ Nur Komariyah, "GERAKAN PEREMPUAN PARTAI POLITIK : STUDI TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN OLEH PEREMPUAN BANGSA DI KABUPATEN SIDOARJO" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), <http://digilib.uinsa.ac.id/15931/>.

kehidupannya. Pemberdayaan yang dimaksud dalam studi ini adalah upaya memperkuat perempuan di bidang politik agar dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Perempuan termasuk kedalam kelompok yang lemah atau tidak berdaya secara struktural yakni kelompok yang tidak berdaya secara gender atau karena mengalami ketidakadilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu salah satunya politik.¹²

Untuk itu, dalam upaya dan mencapai tujuan pemberdayaan menurut Edi Suharto dapat dilakukan dengan menerapkan lima pendekatan atau yang disingkat 5P yaitu :

1. **Pemungkinan** yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi kelompok-kelompok yang lemah dan tidak berdaya didalam masyarakat termasuk perempuan berkembang secara optimal.
2. **Penguatan** yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki kelompok-kelompok yang lemah dan tidak berdaya didalam masyarakat termasuk perempuan dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya.
3. **Perlindungan** yaitu penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan kelompok-kelompok yang lemah dan tidak berdaya didalam masyarakat termasuk perempuan.
4. **Penyokongan** yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar kelompok-kelompok yang lemah dan tidak berdaya didalam masyarakat termasuk perempuan mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.
5. **Pemeliharaan** yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan.

Perempuan dan Partai Politik

Menurut Lovenduski ada semacam paradoks dimana meskipun partai politik memegang peran kunci dalam produksi dan reproduksi

¹² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial* (Refika Aditama, 2005).

“gender effects in politics”, justru partai politik merupakan variabel yang hilang karena minim dikaji secara mendalam dalam riset perempuan dan politik. Secara khusus dalam konteks Indonesia, kajian tentang pengalaman partai politik dan strategi gender digambarkan sebagai upaya “separuh hati” oleh Ani W. Soetjipto berdasarkan riset pengalaman tiga partai pemenang Pemilu 2009. Para akademisi politik berperspektif feminis menyatakan bahwa tujuan implisit masuknya para pendukung kesetaraan ke dalam partai politik adalah untuk memastikan terjadinya perubahan sikap, cara pandang, dan tindakan yang semakin responsif gender. Dalam tataran ideal, mereka menyebutnya sebagai upaya “feminizing parties’ programmes” yang pada gilirannya berpotensi ikut mendorong perubahan pada pemerintahan.¹³

Metode

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk mendeskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai pemberdayaan perempuan dalam partai politik yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo. Sumber data dalam studi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara secara langsung dengan informan dan data sekunder berupa buku, artikel, jurnal, penelitian terdahulu serta dokumen maupun arsip dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian. Informan penelitian terdiri dari pengurus dan perempuan kader baik itu dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo maupun organisasi sayap perempuan yakni Perempuan Indonesia Raya (PC PIRA Kabupaten Sidoarjo), tokoh perempuan dan tokoh masyarakat. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi, dengan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dimana untuk memastikan data yang diperoleh telah valid, dengan cara membandingkan dan mencocokkan data yang diperoleh dari masing-masing informan.

¹³ Heru Samosir, Dewi Mulyani Setiawan, and Anna margret Lumban Gaol, *Meretas Jarak Afirmasi Dan Administrasi: Studi Tentang Penerapan Kebijakan Afirmasi Pada Struktur DPP Partai Politik* (Jakarta: Cakra Wikara Indonesia, 2021).

Analisis data menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹⁴

Hasil dan Pembahasan

Upaya Pemberdayaan Perempuan dalam Partai Politik di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo

Pemberdayaan merupakan usaha memperkuat kelompok lemah atau tidak berdaya agar mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Perempuan menjadi satu kelompok didalam masyarakat yang tidak berdaya atau lemah secara struktural dimana ketidakberdayaan yang mereka alami bukan disebabkan oleh dirinya sendiri, melainkan akibat dari adanya ketidakadilan dan diskriminasi yang menimpa mereka dalam aspek-aspek kehidupan tertentu salah satunya politik. Dominasi budaya patriarki dan stereotipe terhadap kaum perempuan dalam kaitannya dengan politik merupakan wujud nyata dari ketidakadilan dan diskriminasi yang menyebabkan perempuan tidak memiliki kekuatan atau keberdayaan untuk berperan dalam dunia politik, sehingga perempuan baik dalam hal kehadiran maupun kepentingannya di ranah politik seringkali termarginalkan.¹⁵ Untuk itu memberdayakan perempuan dalam bidang politik terutama melalui partai politik menjadi upaya konkrit lainnya untuk mendukung keterlibatan perempuan dalam politik disamping telah hadirnya kebijakan afirmasi kuota minimal keterwakilan politik perempuan.

Partai Gerindra khususnya di Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu partai politik yang mampu secara konsisten mendudukkan kader perempuan dalam tiga kali penyelenggaraan pemilu dan hal tersebut menunjukkan bahwa Partai Gerindra di Kabupaten Sidoarjo memiliki perhatian terhadap pemberdayaan perempuan di bidang politik.

¹⁴ Arif Rachman et al., *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

¹⁵ Rasyidin and Aruni Fidhia, "GENDER DAN POLITIK: Keterwakilan Perempuan Dalam Politik" (Universitas Malikussaleh, 2016).

Berdasarkan hasil studi di lapangan, DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo menjalankan upaya pemberdayaan sesuai dengan teori pemberdayaan 5P yang dikemukakan oleh Edi Suharto. Selain itu, pemberdayaan perempuan di bidang politik pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dilakukan baik terhadap perempuan kader partai maupun perempuan umum atau masyarakat.

Perempuan kader partai

Kehadiran anggota terutama kader sangat penting bagi partai politik sebab mereka menjadi sumber daya utama untuk menjalankan fungsi dan roda organisasi, serta memperjuangkan program partai.¹⁶ Maka dari itu partai politik dalam hal ini dapat menjalankan salah satu peran strategisnya yaitu memberdayakan kader-kadernya di bidang politik terutama kader perempuan partai. Sejalan dengan teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Edi Suharto, DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo menerapkan lima pendekatan dalam upayanya memberdayakan perempuan kader partai, diantaranya yaitu:

Pemungkinan. Pada pendekatan pemungkinan, terdapat tiga upaya yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo untuk memberdayakan perempuan di bidang politik. Pertama yaitu dengan mengimplementasikan kebijakan afirmatif atau pemenuhan kuota keterwakilan perempuan baik dalam kepengurusan partai, pencalonan anggota legislatif, fraksi atau anggota legislatif maupun kepengurusan organisasi sayap. Berdasarkan studi dokumen, ditemukan bahwa kebijakan afirmatif pada Partai Gerindra terdapat di dalam AD/ART Partai Pasal 7, 8 9 10 dan 11 mengenai keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai di setiap tingkatan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan.¹⁷ Upaya mengimplementasikan kebijakan afirmatif yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu upaya dalam memberdayakan perempuan di bidang politik sebab melalui upaya tersebut mampu membuka ruang dan

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka Utama, 2003).

¹⁷ "ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA" (Partai Gerindra, 2020).

kesempatan yang lebih besar bagi perempuan untuk dapat terlibat dalam berbagai aktivitas dan proses politik. Keterlibatan perempuan khususnya dalam hal ini perempuan kader dalam berbagai aktivitas dan proses politik termasuk duduk dalam jabatan strategis di partai maupun nantinya di lembaga politik formal dalam prosesnya mampu memberdayakan potensi perempuan kader di bidang politik.¹⁸

Kedua yaitu dengan membentuk bidang dan organisasi sayap khusus perempuan. Bidang dan organisasi sayap khusus perempuan di Partai Gerindra adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan Indonesia Raya atau yang disingkat PIRA. Dibentuknya bidang dan organisasi sayap khusus perempuan menjadi wadah bagi partai untuk memberdayakan potensi perempuan kader di bidang politik. Hal ini dikarenakan melalui bidang dan organisasi sayap PIRA yang mana sepenuhnya diurus dan dijalankan oleh perempuan, perempuan kader dilatih untuk mampu mengembangkan dan meningkatkan potensinya dalam berpolitik yaitu kemampuan dalam berorganisasi, kemandirian dalam merumuskan, menentukan dan menjalankan sendiri berbagai agenda ataupun kegiatan yang menjadi aspirasi dan kepentingan politik perempuan.¹⁹ Berbagai potensi yang telah dikembangkan dan dioptimalkan melalui wadah tersebut diharapkan mampu menjadikan perempuan kader semakin berdaya dalam berpolitik.

Ketiga yaitu dengan menjalankan kaderisasi. Kaderisasi khusus perempuan pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dijalankan melalui wadah organisasi sayap PIRA. Kaderisasi khusus perempuan yang dijalankan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo menjadi upaya sekaligus sarana untuk memberdayakan potensi perempuan kader di bidang politik sebab melalui proses tersebut, perempuan kader dibina, dikembangkan dan dioptimalkan segenap potensinya di bidang politik. Kaderisasi khusus perempuan dijalankan dalam bentuk-bentuk kegiatan seperti diskusi antar perempuan mengenai

¹⁸ Moch. Sujayadi, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, 2022.

¹⁹ RR. Ira Damayanti, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, 2022.

isu-isu seputar politik terkini, dikirim untuk mengikuti diklat, diikutsertakan dalam kegiatan reses dan sosialisasi yang dilakukan oleh anggota legislatif, kegiatan sosial ke masyarakat dan pemberdayaan di bidang ekonomi.

Penguatan. Pada pendekatan penguatan, upaya yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo untuk memberdayakan perempuan di bidang politik adalah dengan memberikan pendidikan politik. Pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo bersifat umum yakni diperuntukkan bagi semua kader baik itu perempuan maupun laki-laki. Pendidikan politik di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo secara umum dijalankan melalui beberapa bentuk kegiatan yakni dalam bentuk pertemuan pengurus dan kader partai di berbagai tingkatan yang diisi dengan pembekalan materi seputar kebangsaan dan kepartaian Gerindra oleh pengurus DPC, sarasehan politik dan diklat kader (pendidikan dan pelatihan) yang diselenggarakan oleh partai ditingkat pusat atau DPP dan bertempat di Hambalang.²⁰

Pendidikan politik khusus untuk perempuan kader dijalankan melalui kegiatan non formal yaitu dengan mengikutsertakan perempuan kader dalam setiap aktivitas ataupun kegiatan politik keseharian partai seperti rapat dan konsolidasi partai dengan maksud agar dapat mengasah dan meningkatkan kemampuan berpolitik perempuan kader. Pemberdayaan melalui pendidikan politik diharapkan dapat memberikan kekuatan bagi perempuan kader agar mampu melibatkan diri secara maksimal dalam ranah perpolitikan terutama dalam proses pengambilan keputusan sehingga perempuan kader benar-benar mampu mengambil peran dan mempengaruhi kebijakan baik di lingkup partai maupun lembaga politik formal.²¹

Perlindungan. Pada pendekatan perlindungan, upaya yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo adalah dengan menempatkan perempuan pada jabatan-jabatan strategis dalam

²⁰ Sujayadi, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo.

²¹ Damayanti, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo.

struktur kepengurusan partai.²² DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo telah berupaya untuk menempatkan perempuan kadernya pada jabatan-jabatan yang cukup strategis seperti bendahara dan ketua bidang.²³ Hal tersebut juga didukung dengan studi dokumen yang telah dilakukan terhadap dokumen susunan pengurus partai dimana terdapat 13 orang perempuan (32,5 persen) dalam struktur kepengurusan partai yakni sebanyak 11 orang perempuan pada jabatan ketua bidang, 1 orang perempuan pada jabatan bendahara, dan 1 orang perempuan pada jabatan wakil sekretaris. Menempatkan perempuan pada jabatan strategis dalam struktur kepengurusan partai menjadi salah satu upaya yang sangat penting untuk menjadikan perempuan berdaya di politik khususnya dalam partai politik. Hal ini dikarenakan dengan perempuan ditempatkan pada jabatan-jabatan strategis dalam struktur kepengurusan maka perempuan memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk turut serta mempengaruhi dan menentukan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan partai sehingga keputusan atau kebijakan yang diambil oleh partai tidak merugikan dan dapat mengakomodasi kepentingan serta kebutuhan perempuan.²⁴

Penyokongan. Pada pendekatan penyokongan, upaya yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo adalah dengan memberikan dorongan dan arahan politik kepada perempuan kader. Dukungan politik berupa dorongan yang diberikan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo kepada perempuan kader dimaksudkan agar perempuan kader dapat aktif dalam berkegiatan politik di partai, masyarakat maupun maju dalam pemilihan umum. Sementara, bimbingan politik berupa arahan diberikan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan agar perempuan kader dapat memahami peran dan tugas yang harus dijalankan dalam berkegiatan politik di partai.²⁵ Upaya tersebut dapat menjadikan perempuan kader terus termotivasi untuk memberdayakan diri mereka di bidang politik

²² Sujayadi, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo.

²³ Novita Indriani, Kader perempuan partai, 2022.

²⁴ Samosir, Setiawan, and Gaol, *Meretas Jarak Afirmasi Dan Administrasi: Studi Tentang Penerapan Kebijakan Afirmasi Pada Struktur DPP Partai Politik*.

²⁵ Sujayadi, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo.

dan partai politik. Selain itu, DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo juga memberikan bimbingan dan dukungan politik berupa pembekalan politik untuk seluruh kader termasuk perempuan kader menjelang pemilihan umum.²⁶ Melalui upaya tersebut, seluruh kader khususnya perempuan kader dibekali mengenai cara atau strategi yang dapat dijalankan ketika terjun ke masyarakat dan bertarung di lapangan sehingga mampu lebih berdaya untuk bersaing dalam kontestasi politik.

Pemeliharaan. Pada pendekatan pemeliharaan, upaya yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo adalah dengan melibatkan perempuan kader dalam setiap program dan kegiatan partai mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan program dan kegiatan.²⁷ Upaya tersebut dijalankan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan agar perempuan kader dapat terus aktif dan eksis dalam berkegiatan politik di partai maupun nantinya di ranah politik yang lebih luas.

Perempuan umum/masyarakat

Perempuan umum atau dari kalangan masyarakat yang dimaksud adalah ibu-ibu rumah tangga dan anak muda perempuan baik yang telah bergabung sebagai kader PIRA maupun yang belum bergabung sebagai kader PIRA (umum). Pemberdayaan perempuan umum atau dari kalangan masyarakat di bidang politik dijalankan melalui wadah organisasi sayap PIRA yakni Pengurus Cabang PIRA Kabupaten Sidoarjo. Sejalan dengan teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Edi Suharto, PC PIRA Kabupaten Sidoarjo menerapkan lima pendekatan dalam upayanya memberdayakan perempuan umum atau dari kalangan masyarakat, diantaranya yaitu:

Pemungkinan. Pada pendekatan pemungkinan, upaya yang dilakukan oleh PC PIRA Kabupaten Sidoarjo adalah dengan memberikan penyadaran politik dan sosialisasi terkait PIRA.

²⁶ Damayanti, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo.

²⁷ Rochmania, Kader perempuan partai, 2022.

Penyadaran politik diberikan sebagai upaya awal untuk memberdayakan perempuan umum atau masyarakat agar mereka sadar mengenai politik dan pentingnya terlibat dalam politik sehingga dapat tergerak dan termotivasi untuk memberdayakan diri dan potensinya di bidang politik. Sementara sosialisasi terkait profil dan kegiatan PIRA dijalankan oleh PC PIRA Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan untuk menarik minat perempuan umum atau dari kalangan masyarakat agar bersedia terlibat dalam kegiatan-kegiatan PIRA termasuk bergabung dalam organisasi PIRA dan memberdayakan diri beserta potensinya di berbagai bidang khususnya bidang politik. Sosialisasi tersebut dijalankan dengan masuk kedalam kegiatan-kegiatan kelompok perempuan seperti arisan, pkk, dan dasawisma.²⁸

Penguatan. Pada pendekatan penguatan, upaya yang dilakukan oleh PC PIRA Kabupaten Sidoarjo adalah dengan memberikan pendidikan politik. Terdapat beberapa bentuk kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh PC PIRA Kabupaten Sidoarjo yaitu kegiatan pendidikan politik dalam bentuk pertemuan kader yang diisi dengan pemaparan materi seputar politik dan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik serta profil PIRA, mengikutsertakan kader dalam kegiatan-kegiatan politik para anggota legislatif partai seperti reses dan sosialisasi ke beberapa dapil, dan mengikutsertakan perwakilan kader dalam kegiatan diklat khusus perempuan yang diadakan oleh pengurus PIRA di tingkat provinsi yakni Pengurus Daerah (PD) PIRA Jawa Timur.²⁹ Pemberdayaan melalui pendidikan politik diharapkan dapat memperkuat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran politik perempuan umum atau dari kalangan masyarakat sehingga dalam prosesnya nanti mereka dapat tertarik untuk terlibat dalam dunia politik.

Perlindungan. Pada pendekatan perlindungan, upaya yang dilakukan oleh PC PIRA Kabupaten Sidoarjo adalah melakukan koordinasi dengan internal partai terkait pemenuhan keterwakilan

²⁸ Anik Windiastri, Kader PAC PIRA Kabupaten Sidoarjo, 2022.

²⁹ Erna Kusumawati, Pengurus Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PC PIRA Kabupaten Sidoarjo, 2022.

perempuan. Upaya tersebut bertujuan untuk memperkuat keterwakilan perempuan baik di internal partai maupun di dalam pemilu serta mendorong partai agar dalam pengajuan perempuan sebagai calon anggota legislatif mempertimbangkan dari sisi kualitas sehingga perempuan yang dimajukan oleh partai dalam pemilu tidak sekedar dijadikan sebagai pelengkap untuk memenuhi persyaratan mengikuti pemilu.³⁰ Upaya tersebut diharapkan mampu memberdayakan perempuan di bidang politik yakni memastikan agar perempuan baik itu perempuan umum atau dari kalangan masyarakat terutama yang telah menjadi kader PIRA maupun perempuan kader partai tidak mengalami diskriminasi dan dominasi yang dapat merugikan mereka dalam politik.

Penyokongan. Pada pendekatan penyokongan, upaya yang dilakukan oleh PC PIRA Kabupaten Sidoarjo adalah dengan memberikan usulan terkait kandidat perempuan kepada internal partai. Dukungan tersebut diberikan oleh PC PIRA Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan untuk mendorong perempuan-perempuan umum atau dari kalangan masyarakat khususnya yang memiliki potensi agar tidak hanya aktif di lingkup organisasi sayap namun di ranah yang lebih luas seperti dalam kepengurusan di internal partai maupun ajang pemilihan umum.³¹ Dukungan tersebut memungkinkan bagi perempuan umum atau dari kalangan masyarakat untuk dapat mengembangkan dirinya di ranah politik. Hal tersebut juga didukung dengan studi dokumen terhadap dokumen AD/ART Partai Pasal 25 Ayat 3 yang menerangkan bahwasannya organisasi sayap pada Partai Gerindra di setiap tingkatan mempunyai hak mengajukan 1 (satu) orang pengurusnya menjadi pengurus Partai atau Dewan Penasehat sesuai tingkatan, sehingga dukungan dalam bentuk pemberian usulan terkait kandidat perempuan potensial kepada internal partai khususnya dalam kepengurusan internal menjadi salah satu wewenang yang dimiliki oleh setiap organisasi sayap di Partai

³⁰ Mimik Idayana, Ketua PC PIRA Kabupaten Sidoarjo., 2022.

³¹ Idayana.

Gerindra termasuk dalam hal ini PIRA sebagai organisasi sayap perempuan partai.

Pemeliharaan. Pada pendekatan pemeliharaan, upaya yang dilakukan oleh PC PIRA Kabupaten Sidoarjo adalah dengan menjalankan program dan kegiatan pemberdayaan secara rutin dan kontinu.³² Upaya tersebut dijalankan dengan tujuan untuk memberdayakan perempuan yakni menjaga dan mendorong keaktifan serta eksistensi perempuan umum atau dari kalangan masyarakat dalam berpartisipasi di ranah publik atau politik.

Berdasarkan hasil studi diatas, dapat diakui bahwa telah banyak upaya yang dilakukan oleh partai politik yakni DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dalam memberdayakan perempuan di bidang politik. Namun jika dianalisis lebih dalam menggunakan teori perempuan dan partai politik yang dikemukakan oleh Ani Widyani Soetjipto dalam bukunya, Partai Politik dan Strategi Gender Separuh Hati, maka ditemukan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo sebenarnya cenderung masih “separuh hati” dalam memajukan peran perempuan di politik. Hal ini dapat dianalisis setidaknya melalui tiga aspek seperti yang dijelaskan oleh Ani Widyani Soetjipto.

Aspek pertama yakni tidak adanya kebijakan pengarusutamaan gender atau responsif gender dalam partai politik. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen yang telah dilakukan, DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini sebenarnya telah memiliki kebijakan pengarusutamaan gender atau responsif gender dalam AD/ART nya. Hal ini dapat dilihat di dalam AD/ART Partai Gerindra Pasal 7, 8, 9, 10 dan 11 ayat mengenai keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai di setiap tingkatan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan. Namun upaya ini sesungguhnya masih sebatas mengadopsi dari undang-undang yang telah ada yakni

³² Kusumawati, Pengurus Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PC PIRA Kabupaten Sidoarjo.

Undang-Undang Partai Politik dimana memang mengharuskan setiap partai politik untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam komposisi kepengurusan partai baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ani Widyani Soetjipto, dimana belum ditemukan adanya kebijakan pengarusutamaan gender atau responsif gender dalam AD/ART partai selain berkaitan dengan pasal-pasal yang telah disebutkan tadi, memperlihatkan bahwa upaya partai politik yakni DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo sampai saat ini masih “separuh hati” dalam memajukan peran perempuan di politik.³³

Aspek yang kedua yaitu penempatan perempuan pada posisi-posisi yang tidak strategis dalam struktur kepengurusan partai. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen terhadap susunan pengurus partai terdapat 13 orang perempuan dalam struktur kepengurusan dimana 1 orang perempuan pada posisi bendahara partai, 1 orang perempuan pada posisi wakil sekretaris partai dan 11 orang perempuan pada posisi ketua bidang atau divisi. Berdasarkan data tersebut, telah banyak posisi yang ditempati oleh perempuan dalam struktur kepengurusan DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dan posisi-posisi tersebut sebenarnya memungkinkan untuk perempuan dapat turut mempengaruhi dalam setiap proses pengambilan keputusan atau kebijakan partai. Namun posisi-posisi tersebut dalam praktiknya belum mampu menjadikan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam partai politik. Ketua atau elit partai politik atau dalam Partai Gerindra disebut KSB (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) masih mendominasi dalam pengambilan keputusan.³⁴ Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ani Widyani Soetjipto, dimana meski jumlah kehadiran perempuan dalam kepengurusan partai mengalami peningkatan secara teratur, tetapi representasi politik perempuan dalam kepengurusan parpol tidak

³³ Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana: Esai-Esai Pilihan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005).

³⁴ Indriani, Kader perempuan partai.

secara otomatis menguat karena posisi-posisi strategis pengambil keputusan masih sangat minim diisi oleh perempuan.³⁵

Aspek yang ketiga yaitu berkaitan dengan departemen perempuan dalam partai politik. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen yang telah dilakukan, bidang pemberdayaan perempuan dan organisasi sayap khusus perempuan di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo yaitu PIRA (Perempuan Indonesia Raya) sebenarnya telah menjalankan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam memajukan peran perempuan di politik. Namun sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ani Widyani Soetjipto bahwa partai politik termasuk dalam hal ini DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo cenderung menyerahkan urusan dan isu-isu perempuan sepenuhnya kepada departemen perempuan untuk mengurusnya.³⁶ Hal ini dapat dilihat dari belum adanya dukungan dalam bentuk program, kegiatan ataupun pendanaan yang diberikan oleh partai kepada bidang pemberdayaan perempuan dan khususnya organisasi sayap perempuan dalam rangka memajukan peran perempuan di politik. Upaya untuk memberdayakan dan memajukan peran perempuan di politik khususnya dalam partai politik seharusnya tidak begitu saja berhenti dengan membentuk bidang dan organisasi sayap perempuan, namun harus disertai dengan upaya-upaya keberlanjutan yang dilakukan oleh partai politik agar keberadaan bidang dan organisasi sayap perempuan dapat lebih optimal untuk memajukan peran perempuan di politik.

Faktor Penghambat Pemberdayaan Perempuan dalam Partai Politik di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo

Berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo untuk memberdayakan perempuan di bidang politik. Namun, dalam realitas di lapangan ditemukan adanya faktor penghambat yang menyebabkan upaya pemberdayaan perempuan di bidang politik pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo belum

³⁵ Samosir, Setiawan, and Gaol, *Meretas Jarak Afirmasi Dan Administrasi: Studi Tentang Penerapan Kebijakan Afirmasi Pada Struktur DPP Partai Politik*.

³⁶ Samosir, Setiawan, and Gaol.

berjalan secara optimal. Faktor penghambat tersebut berasal dari dalam diri perempuan (internal) maupun luar diri perempuan (eksternal).

Faktor Internal

Peran domestik menjadi faktor utama dari dalam diri perempuan yang menghambat pemberdayaan perempuan dalam partai politik di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo. Perempuan pada umumnya memiliki waktu yang terbatas untuk dapat beraktivitas di luar rumah atau ranah publik jika dibandingkan laki-laki. Hal tersebut dikarenakan dalam pembagian peran gender, perempuan memiliki peran dan tanggung jawab utama di dalam rumah tangga yakni mengurus anak dan suami, sehingga perempuan yang memutuskan untuk aktif dalam politik praktis secara otomatis akan memiliki peran ganda yaitu sebagai istri dan ibu di ranah domestik maupun perempuan politik di ranah publik. Keterbatasan waktu yang disebabkan oleh peran domestik tersebut mengakibatkan perempuan tidak dapat leluasa dan maksimal dalam memberdayakan dirinya di ranah politik.³⁷

Faktor Eksternal

Terdapat 3 faktor penghambat pemberdayaan yang berasal dari luar diri perempuan. Pertama yaitu budaya patriarki. Pada faktor ini, masyarakat masih memiliki pandangan yang negatif terhadap keterlibatan perempuan di dunia politik termasuk partai politik. Pandangan negatif tersebut berakar dari budaya patriarki yang mempersepsikan bahwa perempuan tidak pantas, tidak layak dan tidak cocok untuk masuk ke dunia politik.³⁸ Hal tersebut menyebabkan masyarakat kurang memberikan dukungan kepada perempuan yang terjun ke dalam dunia politik. Kondisi tersebut tentu menjadi hambatan dalam upaya memberdayakan perempuan di ranah politik

³⁷ Very Wahyudi, "Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender," *Politea: Jurnal Politik Islam* 1, no. 1 (2018): 63–83.

³⁸ Nurbaity Prastyandana Yuwono, "Perempuan Dalam Kungkungan Budaya Politik Patriarkhis," *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 10, no. 2 (2018): 96–115, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i2.9906>.

termasuk partai politik. Kedua yaitu kesalahpahaman masyarakat dalam menginterpretasikan ajaran agama terkait larangan keterlibatan perempuan dalam dunia politik dan kepemimpinan. Padahal agama sejatinya memberikan posisi yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk dapat terlibat di berbagai bidang kehidupan bahkan diajarkan untuk saling bekerjasama.³⁹ Oleh karena itu persoalan agama yakni kesalahpahaman masyarakat dalam menginterpretasikan ajaran agama menjadi hambatan dalam upaya memberdayakan perempuan di ranah politik termasuk partai politik.

Ketiga yaitu kurangnya komitmen partai dalam pemberdayaan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dari masih kurangnya keberpihakan dan strategi khusus dari partai politik untuk mendorong perempuan agar mampu berdaya di politik khususnya di lembaga legislatif. Kurangnya komitmen partai dalam memberdayakan perempuan salah satunya disebabkan oleh kondisi partai yang mana selama ini masih cenderung tertutup terhadap perempuan di politik. Kondisi partai yang cenderung tertutup adalah berkaitan dengan sikap dan keputusan yang diambil oleh pimpinan partai terutama terhadap perempuan dalam partai politik dimana dalam realitasnya selama ini para pimpinan partai pada umumnya masih kurang membuka ruang sepenuhnya bagi keterlibatan perempuan di politik. Kurangnya komitmen partai menjadi salah satu faktor yang turut menghambat optimalnya pemberdayaan perempuan di ranah politik khususnya dalam partai politik.⁴⁰

Strategi Mengatasi Hambatan Pemberdayaan Perempuan dalam Partai Politik di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo

Berbagai faktor penghambat menyebabkan upaya pemberdayaan perempuan pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, DPC Partai Gerindra

³⁹ St. Habibah, "Partisipasi Dan Peran Perempuan Dalam Partai Politik," *Al-Maiyyah* 8, no. 2 (2015): 342–66.

⁴⁰ Dwi Astutik, *Tokoh Perempuan*, 2022.

Kabupaten Sidoarjo menjalankan beberapa strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Adapun strategi yang dijalankan diantaranya:

Strategi Mengatasi Hambatan Internal

Untuk mengatasi hambatan internal berupa peran domestik, strategi yang dijalankan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo adalah dengan memberikan keleluasaan waktu khusus bagi perempuan kader untuk dapat mengatur sendiri waktunya dalam berkegiatan politik di partai. Contoh nyatanya adalah ketika terdapat kegiatan partai yang berlangsung hingga malam hari, maka partai memperbolehkan perempuan kadernya untuk tidak mengikuti kegiatan hingga selesai. PIRA dalam hal ini juga memberikan keleluasaan kepada pengurus dan kadernya untuk mengadakan pertemuan dan kegiatan pada waktu-waktu yang memungkinkan mereka dapat hadir dan tidak disibukkan dengan urusan rumah tangga atau keluarga seperti pada hari kerja. Strategi tersebut dijalankan dengan tujuan agar perempuan dapat tetap aktif dalam memberdayakan dirinya di ranah politik namun tidak meninggalkan peran dan tanggung jawabnya di ranah domestik.

Strategi Mengatasi Hambatan Eksternal

Untuk mengatasi hambatan eksternal berupa budaya patriarki dan persoalan agama, strategi yang dijalankan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo adalah dengan mendorong perempuan untuk aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan baik yang diadakan oleh partai maupun organisasi sayap PIRA. Strategi tersebut dijalankan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui dan melihat sendiri terkait aktivitas dan kiprah perempuan di politik sekaligus memberikan pemahaman dan penyadaran politik kepada masyarakat mengenai dampak positif dari keterlibatan perempuan dalam dunia politik dimana perempuan lebih memiliki perhatian pada agenda politik yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, persepsi masyarakat dapat berubah dan pada akhirnya turut memberikan dukungan terhadap upaya pemberdayaan perempuan di ranah politik.

Sedangkan untuk mengatasi hambatan eksternal berupa kurangnya komitmen partai dalam pemberdayaan perempuan, strategi yang dapat dijalankan adalah dengan memberikan pelatihan negosiasi kepada perempuan. Kondisi dimana partai kurang memiliki komitmen yang serius terhadap pemberdayaan perempuan di bidang politik, maka pada gilirannya perempuan dalam partai politik itu sendiri yang harus turut memperjuangkan hal tersebut. Untuk itu melalui strategi tersebut, diharapkan perempuan memiliki kemampuan untuk menegosiasikan agenda atau kepentingan-kepentingannya dengan pihak partai terutama pimpinan partai sehingga mampu mendorong dan memperkuat komitmen partai terhadap pemberdayaan perempuan di bidang politik.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan, pertama, upaya pemberdayaan perempuan dalam partai politik di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo menerapkan sepenuhnya teori pemberdayaan 5P yang dikemukakan oleh Edi Suharto. Upaya pemberdayaan perempuan di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dijalankan kepada dua elemen yaitu perempuan kader dan perempuan umum atau masyarakat. Upaya pemberdayaan terhadap perempuan kader yaitu Pemungkinan dengan mengimplementasikan kebijakan afirmatif, membentuk bidang dan organisasi sayap khusus perempuan, dan menjalankan kaderisasi, Penguatan dengan memberikan pendidikan politik, Perlindungan dengan menempatkan perempuan kader pada jabatan strategis, Penyokongan dengan memberikan dorongan dan arahan serta pembekalan politik, Pemeliharaan dengan melibatkan perempuan dalam setiap program dan kegiatan partai. Sedangkan upaya pemberdayaan terhadap perempuan umum atau masyarakat yang dijalankan melalui wadah organisasi sayap perempuan partai (PIRA) yaitu Pemungkinan dengan memberikan penyadaran politik dan sosialisasi terkait PIRA, Penguatan dengan memberikan pendidikan politik, Perlindungan dengan berkoordinasi dengan internal partai terkait pemenuhan keterwakilan perempuan, Penyokongan dengan memberikan usulan terkait kandidat perempuan

kepada internal partai, dan Pemeliharaan dengan menjalankan program dan kegiatan pemberdayaan secara rutin dan kontinu.

Meskipun telah banyak upaya pemberdayaan yang dijalankan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, sayangnya upaya pemberdayaan tersebut cenderung masih normatif atau “separuh hati” dalam memajukan peran perempuan di politik. Hal tersebut dapat dilihat melalui tiga aspek seperti yang dikemukakan oleh Ani Widayani Soetjipto yaitu (1) belum adanya kebijakan pengarusutamaan gender atau responsif gender dalam AD/ART Partai Gerindra selain yang berkaitan dengan pemenuhan kuota keterwakilan dalam struktur kepengurusan, (2) penempatan perempuan pada posisi-posisi yang tidak strategis dalam struktur kepengurusan partai, dan (3) belum adanya dukungan dalam bentuk program, kegiatan atau pendanaan yang diberikan oleh partai kepada bidang pemberdayaan perempuan dan khususnya organisasi sayap perempuan dalam rangka memajukan peran perempuan di politik.

Kedua, faktor yang menghambat pemberdayaan perempuan dalam partai politik di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo berasal dari dalam diri perempuan (internal) yaitu peran domestik yang dimiliki oleh perempuan dan berasal dari luar diri perempuan adalah budaya patriarki, persoalan agama (kesalahpahaman masyarakat dalam menginterpretasikan ajaran agama) dan kurangnya komitmen partai dalam pemberdayaan perempuan. Ketiga, strategi yang dijalankan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo untuk mengatasi hambatan pemberdayaan perempuan dalam partai politik yakni strategi untuk mengatasi hambatan internal yaitu dengan memberikan keleluasaan waktu kepada perempuan dan hambatan eksternal yaitu dengan mendorong perempuan untuk aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan dan memberikan pelatihan negosiasi kepada perempuan.

Daftar Pustaka

- "ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA." Partai Gerindra, 2020.
- Astutik, Dwi. Tokoh Perempuan, 2022.
- Ballington, Julie. *Pemberdayaan Perempuan Demi Partai Politik Yang Lebih Kuat*. United Nations Development Programme dan National Democratic Institute, 2011.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Budiono, Bambang Teguh. Tokoh masyarakat dari Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, 2022.
- "Calon Terpilih Sidoarjo Hasil Pileg 2009-2019." KPU, 2020. <https://kab-sidoarjo.kpu.go.id/page/read/calon-terpilih>.
- Damayanti, RR. Ira. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, 2022.
- Djoko Prastyo, Fathu Rahman Rosyidi, Rohmadi, Uswatun Auliyani, and Sri Handayani. "Keterampilan Literasi Informasi Mahasiswa Menurut Standar Kompetensi Literasi Informasi Association of College & Research Libraries (ACRL)." *BACA: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi* 39, no. 1 (June 2018): 37-49. <http://dx.doi.org/10.14203/j.baca.v0i0.346>.
- Habibah, St. "Partisipasi Dan Peran Perempuan Dalam Partai Politik." *Al-Maiyyah* 8, no. 2 (2015): 342-66.
- Hidayah, Siti Nurul. "Keterwakilan Perempuan Dalam Politik." *detikNews*, 2018. <https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>.
- Idayana, Mimik. Ketua PC PIRA Kabupaten Sidoarjo., 2022.
- Indriani, Novita. Kader perempuan partai, 2022.
- Komariyah, Nur. "GERAKAN PEREMPUAN PARTAI POLITIK: STUDI TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN OLEH PEREMPUAN

- BANGSA DI KABUPATEN SIDOARJO.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017. <http://digilib.uinsa.ac.id/15931/>.
- Kusumawati, Erna. Pengurus Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PC PIRA Kabupaten Sidoarjo, 2022.
- Lestari, Citra Restu. “Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kompetensi Perempuan Menuju Parlemen (Studi Kasus Di DPD Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara).” Universitas Sumatera Utara, 2018. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/7562>.
- Lukman, Bambang. Tokoh masyarakat dari Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo, 2022.
- Nurman. “Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera Kota Padang Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan.” *Journal of Moral and Civic Education* 1, no. 2 (2017): 63–73. <https://doi.org/doi.org/10.24036/8851412020171219>.
- Rachman, Arif, E. Yochanan, Andi Ilham Samanlangi, and Hery Purnomo. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Rasyidin, and Aruni Fidhia. “GENDER DAN POLITIK: Keterwakilan Perempuan Dalam Politik.” Universitas Malikussaleh, 2016.
- Rochmania. Kader perempuan partai, 2022.
- Samosir, Heru, Dewi Mulyani Setiawan, and Anna margret Lumban Gaol. *Meretas Jarak Afirmasi Dan Administrasi: Studi Tentang Penerapan Kebijakan Afirmasi Pada Struktur DPP Partai Politik*. Jakarta: Cakra Wikara Indonesia, 2021.
- Soetjipto, Ani Widayani. *Politik Perempuan Bukan Gerhana: Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama, 2005.

Sujayadi, Moch. Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo,
2022.

Umagapi, Juniar Laraswanda. "REPRESENTASI PEREMPUAN DI
PARLEMEN HASIL PEMILU 2019: TANTANGAN DAN PELUANG."
Kajian 25, no. 1 (2020): 19–34.

Wahyudi, Very. "Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender."
Politea: Jurnal Politik Islam 1, no. 1 (2018): 63–83.

Windiastri, Anik. Kader PAC PIRA Kabupaten Sidoarjo, 2022.

Yuwono, Nurbaity Prastyana. "Perempuan Dalam Kungkungan
Budaya Politik Patriarkhis." *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 10,
no. 2 (2018): 96–115.
<https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i2.9906>.